Nomor Registrasi																	
Fakultas		Ps/Bagian		Publikasi		Penulis		Th Publikasi		Sumber		Sumber Dana		No urut Publikasi			
0	1	0	3	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	3	2	1

Vol 5 No.1 Januari 2011 ISSN 1978-4392

AKUNTABILITAS :
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI

Persepsi Stakeholder terhadap Kriteria Akuntabilitas, Kriteria Transpransi Laporan Keuangan Daerah

Mukhtaruddin
Minatjik

Audit Lingkungan dan Tanggung jawab Lingkungan Perusahaan Suatu Kajian Literature

Dewi Rina Komarawati

The Role of Conflict to the Intention to Participate in Sistem Keuangan daerah

Muhammad Nasai
Burhanuddin

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan Kelompok Jakarta Islamic Index

Inten Meutia

Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Usaha Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan Guna Pengambilan Keputusan

Emylia Yuniarti

JA	Vol 5	No.1	Halaman 1 - 94	Palembang, Januari 2011	ISSN 1978-4392

ISSN 1978-4392
Vol 5 No.1 Januari 2011
Halaman 1 - 94

AKUNTABILITAS :
JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI

DAFTAR ISI

Mukhtaruddin Minatjik	:	Persepsi stakeholder terhadap Kriteria Akuntabilitas, Kriteria Transpransi Laporan Keuangan Daerah	1 - 24
Dewi Rina Komarawati	:	Audit Lingkungan dan Tanggung jawab Lingkungan Perusahaan Suatu Kajian Literature	25 - 49
Muhammad Nasai Burhanuddin	:	The Role of Conflict to the Intention to Participate in Sistem Keuangan daerah	50 - 62
Inten Meutia	:	Factor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Perusahaan . Kelompok Jakarta Islamic Index	63 - 76
Emylia Yuniarti	:	Penerapan Akuntansi Sumber Daya Manusia Dalam Usaha Meningkatkan Relevansi Laporan Keuangan Guna Pengambilan Keputusan	77- 94

AKUNTABILITAS : JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AKUNTANSI
Vol : 5 No. 1 Januari 2011

Persepsi Stakeholders Terhadap Kriteria Akuntabilitas, Kriteria Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Studi Kasus di Provinsi Sumatera Selatan

Mukhtaruddin
Minatjik

ABSTRACT

In order to generate good governance, an accountability and transparency of local monetary management are absolutely required: One of the monetary accountability and transparency techniques which may be utilized is the financial report of local governments. Since there is a restriction for the external party, that is community, upon the local monetary management, community then relies powerfully on financial reports as the only accountability technique.

This study demonstrated that there were distinct perceptions on accountability and transparency of local financial management. The dissimilarities in perception existed because there were varied dimensions acted as guidelines to assess or identify accountability and transparency criterion. The results of this research empirically showed that tThere was an average difference in stakeholders' perception upon accountability criterion on financial report of local government. And a pair who had such dissimilar perceptions was DPRD-PNS.

Keywords : Good governance, Stakeholders, Accountability, Transparency

PENDAHULUAN

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia antara lain disebabkan oleh tatacara penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Kondisi saat inipun menunjukkan masih berlangsungnya praktek dan perilaku yang bertentangan dengan kaidah tata pemerintahan yang baik, yang bisa menghambat terlaksananya agenda-agenda reformasi. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, partisipasi dalam pembuatan kebijakan sementara

fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antarbangsa, terutama dalam pengelolaan sumber-sumber ekonomi dan aktivitas dunia usaha (bisnis). Semangat desentralisasi demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah dan proses pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

Kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah ditandai dengan adanya desentralisasi. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan. Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang paling diinginkan adalah adanya standar akuntansi pemerintahan. Melalui PP No. 24 tahun 2005 Pemerintah menerbitkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP menjadi pedoman pemerintah baik pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat untuk menyusun laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintah sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan pada gilirannya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga, *good governance* dapat tercapai. Desentralisasi sendiri tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi.

Sebagai salah satu konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang di dalam aturan tersebut dinyatakan bahwa setelah tahun anggaran berakhir, kepala daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Permasalahan diatas menjelaskan bahwa pentingnya hubungan aspek akuntanbilitas dan transparansi, penyajian laporan keuangan terhadap masyarakat dan *stakeholders* lainnya merupakan hal yang utama. Artinya informasi keuangan daerah wajib disajikan oleh Pemerintah Daerah kepada *stakeholders* secara berkala. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas

transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Stakeholders selain penyaji laporan keuangan tersebut dan yang disaji (Anggota DPRD) yaitu masyarakat memerlukan bentuk pertanggungjawaban yang terbuka. Hal ini karena terbatasnya aksebilitas masyarakat terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut. Keterbatasan tersebut akan menimbulkan perbedaan persepsi tentang akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Guna mengetahui perbedaan persepsi *stakeholders* kriteria akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan tersebut maka judul penelitian ini adalah **"Persepsi *Stakeholders* Terhadap Kriteria Akuntabilitas, Kriteria Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Studi Kasus Di Provinsi Sumatera Selatan."**

Rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi Forum *Stakeholders* terhadap kriteria akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan.
2. Bagaimana persepsi *anggota DPRD* terhadap kriteria akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan.
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi antara Forum *Stakeholders dan anggota DPRD* terhadap kriteria akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui persepsi forum *stakeholders* terhadap kriteria akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan
2. Untuk mengetahui persepsi anggota DPRD terhadap kriteria transparansi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan
3. Untuk mengetahui perbedaan persepsi antara forum *stakeholders* dan anggota DPRD terhadap kriteria akuntabilitas keuangan dan trasparansi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Dapat dijadikan referensi pemerintah daerah untuk mewujudkan *good governance*.
2. Mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang didasarkan pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Mendorong terpeliharanya kepercayaan masyarakat pada pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.
4. Sebagai bahan peningkatan kualitas pembuatan keputusan, arah dan kebijakan pemerintah daerah yang akan datang.
5. Membantu pengembangan khasanah ilmu pengetahuan.

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Persepsi Stakeholders

Persepsi merupakan kerangka bagi individu untuk memahami suatu obyek. Individu akan bertindak atas dasar rangsangan yang diterimanya. Persepsi dimulai dari adanya kontak antara individu dengan obyek yang diikutinya dengan adanya interaksi. Dengan demikian persepsi bersifat individu dan subyektif. Pengertian persepsi menurut kamus umum bahasa Indonesia (1996) adalah proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri individu sehingga mengenal obyek dengan jalan asosiasi pada satu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, peraba dan indera lainnya sehingga bayangan itu dapat disadari. Sedangkan menurut Siegel dan Marconi (1989) persepsi adalah proses yang dialami oleh individu dalam menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpresentasikan suatu rangsangan ke dalam suatu gambaran yang berarti dan koheran dengan dunia luar. Sedangkan pengertian *Stakeholders* merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi

1.2. Akuntabilitas

Di Indonesia, permasalahan akuntabilitas publik menjadi sangat penting sejak otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu sejak Januari 2001. Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu kepemerintahan yang baik yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu (Budiarjo,1998). Peter (2000) menyebutkan ada 3 (tiga) tipe akuntabilitas yaitu (1) akuntabilitas keuangan, (2) akuntabilitas

administratif, (3) akuntabilitas kebijakan publik. Akuntabilitas keuangan bermakna pertanggungjawaban keuangan dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan sehingga mengurangi penumpukan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi. *(checks and balance system).*

Salah satu akuntabilitas yang ada di pemerintahan adalah akuntabilitas keuangan yang ada di pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2001) akuntabilitas keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan .penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yakni DPRD dan masyarakat luas. Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (LAN dan BPKP, 2001). Menurut Mardiasmo (2001) aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam akuntabilitas keuangan adalah:

1. Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah. Setiap transaksi yang dilakukan harus dapat ditelusuri otoritas legalnya
2. Pengelolaan keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan finansial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus.

Sedangkan prinsip-prinsip akuntabilitas keuangan meliputi:

1. Adanya sistem akuntansi dan sistem anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengeluaran daerah yang dilakukan berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dicapai.

Undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan-peraturan turunannya adalah tidak dengan sendirinya dapat menjamin bahwa akuntabilitas akan berjalan dengan baik. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undang yang terkait harus dimonitor, deviasi harus diidentifikasi dan ditelusuri ke pihak yang bertanggung jawab, tindakan korektif dan langkah-langkah pencegahan harus diambil. Hal ini merupakan sisi tersulit dari sebuah *'koin'*. Pemonitoran dilakukan melalui internal kontrol oleh eksekutif sendiri, dan melalui eksternal kontrol yang dilakukan oleh agen-agen *oversight (watchdog).*

Instrumen utama dari akuntabilitas keuangan adalah anggaran pemerintah, data

yang secara periodik dipublikasikan, laporan tahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainya yang disiapkan oleh agen yang independen.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan publik adalah melalui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi, sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2005, dan PP No. 58 Tahun 2005, pemerintah daerah disyaratkan untuk dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bagian dari LKPJ Kepala Daerah. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 mengatur bahwa Kepala Daerah harus memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan Keuangan. Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Laporan keuangan tersebut untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk (a) membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, (b) menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil (c) membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan terkait dengan masalah keuangan negara dan ketentuan lainnya, serta (d) membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan agar laporan keuangan pemerintah daerah bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Maka laporan keuangan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal, dan dapat dipahami. Ketentuan perundangan mensyaratkan pemerintah (Kepala Daerah) untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat berupa laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi di pemerintah daerah. Laporan keuangan itu sendiri bersifat *general purposive*, yaitu dimaksudkan untuk disajikan kepada berbagai pihak *(stakeholders)* yang pada dasarya berbeda-beda kebutuhan informasinya.

1.3. Transparansi

Definisi secara harfiah transparansi adalah suatu keadaan yang jernih dan bening (tembus pandang), transparansi

berati terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap imformasi terkait seperti berbagai peraturan dan perundang-undangan, serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal *(reliable)* dan berkala haruslah tersedia dan dapat diakses oleh publik *(biasanya melalui filter media massa yang* bertanggungjawab). Artinya, transparansi di bangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan (untuk kemudian) dapat dipantau (Mardiasmo, 2005). IMF dalam Definisi yang menjadi dasar *code of good practices on fiscal transparancy* dalam IMF ini menjabarkan transparansi ke dalam empat hal yaitu:

1. Kejelasan peran dan tanggungjawab,
2. Ketersediaan informasi kepada publik,
3. Persiapan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran yang terbuka
4. Jaminan atas integitas.

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dan keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholders* dapat melihat struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dan kebijakan dan proyeksi fiskalnya serta laporan pertanggungjawaban periode yang lalu. Transparansi dan akuntabilitas merupakan atribut yang terpisah, akan tetapi tidak independen. Sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan transparansi (Shende dan Bennet (2004) dalam Budi (2006).

Transparansi di dalam operasi pemerintahan mempunyai beberapa aspek dan dimensi. Pertama, pada tingkat agregat, tranparansi memerlukan persediaan *informasi andal atas tujuan dan peramalan* kebijakan fiskal pemerintah; kedua, data rinci dan diperlukan atas operasi pemerintah, termasuk publikasi atas dokumen anggaran komplehensif yang memuat kiasifikasi akun yang tepat; ketiga, aspek perilaku termasuk ini yang jelas untuk mencegah konflik kepentingan para pejabat yang dipilih dan ditunjuk, peraturan kebebasan informasi, rerangka peraturan transparansi, praktik pelelangan secara terbuka, kode etik petugas pajak, dan laporan audit kinerja yang dipublikasikan.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Ketika pemerintah mempertanggungjawabkan masalah pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan menjadi media utama yang dapat diterima secara umum untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan (Ryan, 2002) dikutip dan Budi (2006)). *Governmental Accounting Standards Board* (GASB, 1999) menyatakan bahwa untuk membantu memenuhi kebutuhan para pengguna laporan yang mempunyai keterbatasan kewenangan, keterbatasan kemampuan atau sumber daya untuk memperoleh informasi mereka menyandarkan pada laporan sebagai sumber informasi penting. Media transparansi dapat diketahui dan laporan keuangan sebab laporan keuangan merupakan hasil akhir pengelolaan keuangan dimana dapat dilihat apakah tujuan telah dicapai, apakah yang diberi amanah telah melaksanakan amanah yang diberikan pemberi amanah.

1.4. Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi keuangan entitas pada suatu periode tertentu. Banyak pihak yang masih beranggapan bahwa penyajian laporan keuangan keuangan hanya merupakan formalitas dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan saja. Laporan keuangan yang dipublikasikan belum benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Seringkali keputusan yang dilakukan lebih banyak didasari oleh keputusan politis semata. Investor dalam menentukan keputusan berinvestasi seringkali tidak begitu merisaukan kondisi keuangan pemerintah daerah tempat mereka akan berinvestasi. Keputusan lebih banyak dipengaruhi oleh informasi lain, misalnya kondisi keamanan stabilitas politik, kemudahan birokrasi dan peraturan daerah serta dukungan infrastruktur yang ada.

Belum dimanfaatkannya laporan keuangan itu karena masih rendahnya budaya akuntabilitas dan budaya membuat laporan keuangan. Penyebab lainnya adalah masih adanya masyarakat yang kurang rasional atau cenderung emosional dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Laporan keuangan akan terasa sekali manfaatnya kala masyarakat semakin rasional dalam menentukan keputusan ekonomi sosial dan politiknya. Jika laporan keuangan publikasian itu dieksplorasi dan ditelaah secara kritis, maka pembaca laporan akan dapat menangkap berbagai informasi penting di dalamnya. Secara spesifik, manfaat penyajian laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi kesehatan keuangan pemerintah terkait dengan likuiditas dan solvabilitas.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu pemerintahan dan perubahan-perubahan yang telah dan akan terjadi.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan, kontrak yang telah disepakati dan ketentuan lain yang dipersyaratkan.
4. Memberikan infomasi untuk perencanaan dan penganggaran.
5. Memberikan informasi untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional:
   a. untuk menentukan biaya program, fungsi dah aktifitas sehingga memudahkan analisis dan melakukan perbandingan dengan kriteria yang telah ditetapkan, membandingkan dengan kinerja periode-periode sebelumnya dan dengan kinerja unit pemerintah lainnya.
   b. untuk mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas operasi, program, aktifitas dan fungsi tertentu di pemerintahan.
   c. untuk mengevaluasi hasil *(outcome)* suatu program, aktivitas dan fungsi serta efektifitas terhadap pencapaian tujuan dan target.
   d. untuk mengevaluasi tingkat pemerataan dan keadilan *(equity dan equality)*.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah yang dilakukan oleh Anondo (2004), Yuliari (2003), Steecolini (2002), Collins (1991), Tayib (1994), Sujana (2001), Jones (1985), Safwirdi (2005), Budi (2006), serta Susetya (2006). Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian terdahulu tersebut tidak semuanya sama dengan penelitian ini. Secara terperinci, penelitian terdahulu yang relevan dengan variabel-variabel penelitian ini disajikan pada uraian berikut ini.

Anondo (2004) meneliti tentang laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah sebagai perwujudan akuntabilitas publik. Hasil penelitiannya, antara lain, menyimpulkan bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan laporan pertanggungjawaban kinerja kepala daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik pemerintah kabupaten/kota.

Yuliari (2003) meneliti tentang kebutuhan dan permintaan *stakeholders*

akan informasi pelaporan keuangan pemerintah. Di samping itu, penelitian ini juga mencoba mengidentifikasi informasi apa saja dan pelaporan yang bagaimana yang diinginkan *stakeholer*. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pertama, pelaporan keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia berupa Nota PAN belum dapat memenuhi kebutuhan *stakeholders* akan informasi keuangan pemerintah pusat; kedua mengidentifikasi hal penting yang diinginkan *stakeholders* sehubungan dengan pelaporan keuangan pemerintah pusat, antara lain, *stakeholders* membutuhkan informasi yang terklasifikasi ke dalam aktiva dan pasiva; para pengamat ekonomi dan badan eksekutif pemerintah membutuhkan informasi daftar hutang dan pembayarannya.

Steecolini (2002) meneliti tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas: apakah laporan tahunan tersebut merupakan medium untuk akuntabilitas. Sampel penelitiannya adalah pemda pemda di Italia. Analisis dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan nampaknya digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca atau tidak. Sementara itu, laporan tersebut tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan aktual dan derajat akuntabilitas di pemda-pemda di Italia perlu dipertanyakan. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa laporan tahunan secara umum dianggap sebagai media utama dalam akuntabilitas (sebagai contoh, Boyne and Law, 1991; Ryan., 2000; Taylor and Rosair, 2000; Coy ., 2001; Mazk ., 2001). Namun, peranan laporan tahunan dalam rangka pelaksanaan akuntabilitas pemerintah kadang-kadang dipertanyakan (sebagai contoh, Jones, 1992; Priest ., 1999).

Collins (1991) melakukan penelitian tentang akses pihak eksternal terhadap informasi keuangan. Hasil penelitiannya menemukan bahwa tidak terbukti adanya pihak eksternal yang dapat memiliki akses terhadap informasi keuangan pemerintah. ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah masih belum menjadi public good.

Tayib (1994) dalam Yuliari (2003) yang meneliti tentang akses pengguna laporan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ada keterbatasan akses pelaporan keuangan, misalnya laporan hanya aksesibel untuk konsultan, auditor; sedangkan

pembayar pajak sama sekali tidak memiliki akses.

Sujana (2001) meneliti persepsi pemakai laporan keuangan sektor publik terhadap pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terjadi perbedaan persepsi antara pihak eksekutif dan legislatif terhadap laporan keuangan. Pihak eksekutif lebih menerima informasi mengenai kesehatan keuangan dan informasi mengenai perencanaan dan anggaran sebagai informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungawaban kepala daerah daripada pihak legislatif. Sedangkan pihak legislatif lebih menerima informasi mengenai kondisi perekonomian sebagai informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah daripada pihak legislatif. Sementara itu, tidak ada perbedaan persepsi antara pihak legislatif dan pihak eksekutif terhadap informasi mengenai kepatuhan hukum dan prosedur sebagai informasi yang seharusnya disajikan dalam laporan pertanggungjawaban kepala daerah.

Jones (1985) dalam Steccolini (2002) menemukan bahwa ketidakmampuan laporan keuangan dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak saja karena disebabkan laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial.

Safwirdi (2005) dalam Susetya (2006) dalam penelitiannya tentang Analisis Keuangan Sektor Publik untuk Pengukuran Kinerja, Transparansi dan Akuntabilitas Publik dan *Good Governance* di Kabupaten dan Kota di Pemerintah Provinsi Jogjakarta menunjukan adanya perbedaan persepsi antara informasi yang disampaikan pihak eksekutif dengan kebutuhan informasi pihak auditor.

Budi (2006) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh positip penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Susetya (2006) dalam penelitiannya di Kabupaten Banyumas juga menemukan adanya perbedaan rata-rata persepsi *stakeholders* terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan dan transparansi maka dapat ditarik 'benang merah' sebagai berikut : ketika pemerintah mempertanggungjawabkan masalah pengelolaan keuangan, pelaporan keuangan menjadi media utama yang dapat diterima secara umum untuk transparansi dan akuntabilitas keuangan (sebagai contoh: Ryan , 2002; Steccolini, 2002; GASB,

1998). Laporan keuangan tidak akan mampu menjadi media transparansi dan akuntabilitas secara baik manakala tidak menyajikan semua informasi relevan yang dibutuhkan dan tidak tersedia secara langsung atau aksesibel bagi *stakeholders* (Jones,1985). Penelitian juga menunjukkan terjadinya perbedaan persepsi pemakai laporan keuangan (*Stakeholders*) yaitu antara pihak eksekutip (penyaji laporan keuangan) dan anggota legislatif (DPRD/yang disaji) (Sujana, 2001), pihak eksekutif dan auditor (Safwirdi 2005) dan antara pihak eksekutif dan masyarakat dan PNS (Susetya, 2006) atau lebih umumnya perbedaan *stakeholders* dâlam menilai akuntabilitas dan transparansi. **Ketiga hasil penelitian terdahulu** menunjukkan perbedaan persepsi terjadi karena adanya perbedaan dalam menilai akuntabilitas keuangan dan transparansi, sehingga rencana penelitian yang berjudul *Persepsi Stakeholders Terhadap Akuntabilitas, Kriteria Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan* ini adalah berusaha untuk mengetahui kriteria yang digunakan *stakeholders* (Anggota *Forum stakeholders*, Anggota DPRD, dan PNS) dalam menilai persepsi akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan. Sehingga kriteria ini sangat penting untuk dilakukan penelitian agar nantinya *stakeholders* mempunyai kesepahaman terlebih dahulu dalam menilai konsep akuntabilitas dan transparansi Persamaan dalam kriteria yang digunakan akan memudahkan setiap *stakeholders* dalam menetapkan akuntabel dan transparannya pengelolaan keuangan sebab kriteria ini dapat dijadikan standar/ukuran sebagai pedoman dalam menilai.

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Terdapat perbedaan rata-rata persepsi *Forum stakeholders* dan anggota DPRD terhadap kriteria akuntabilitas keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan
2. Terdapat perbedaan rata-rata persepsi *Forum stakeholders* dan anggota DPRD terhadap kriteria transparansi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan
3. Terdapat perbedaan rata-rata persepsi *Forum stakeholders* dan anggota DPRD terhadap kriteria akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan pemerintahan daerah provinsi sumatera selatan

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan ruang lingkup pembahasan terfokus pada akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah provinsi sumatera selatan tahun 2007.

Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian yang telah dirumuskan, sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, disamping jenis data. Metode dalam pengumpulan data ini terdiri dari data primer dan sekunder

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran arsip, dokumen dan lain-lain. Sumber data primer pada penelitian ini adalah responden. Jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada mereka selanjutnya dicatat dan dikonversi dalam bentuk skala Likert yang akhirnya menjadi data penelitian.

Sementara itu data sekunder bersumber dari arsip-arsip, dokumen dan catatan-catatan penting yang ada di kantor pemerintah daerah sasaran.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui survey kuesioner terhadap para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah. Tujuan survey adalah untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk menguji persepsi *stakeholders* terhadap kriteria akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini adalah pengguna internal dan eksternal laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyampelan atas responden (pengguna laporan keuangan) dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, suatu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu : Coope dan Schindler, 2001), dimana responden akan diprioritaskan kepada para anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penyaji laporan keuangan dan diperluas ke masyarakat seperti pembayar pajak, akademisi dan LSM.

Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini melibatkan 3 (tiga) variabel yaitu kriteria akuntabilitas (Y_1), variabel transparansi laporan keuangan (Y_2) dan variabel persepsi *stakeholders* (X). Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini :

1. Variabel Kriteria Akuntabilitas

Salah satu akuntabilitas yang ada di pemerintahan adalah akuntabilitas keuangan yang ada di pemerintah daerah. Menurut Murdiasmo (2001) Akuntabilitas Keuangan daerah adalah kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktifitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut yakni DPRD dan masyarakat luas. Sub variabel yang digunakan adalah pertanggungjawaban dan standar pelaporan.

2. Variabel Kriteria Transparansi Laporan keuangan

Transparansi adalah suatu upaya untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang di percayakan kepadanya dan ketaatan pada perundang-undangan (komite SAP 2005) dan laporan keuangan digunakan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah ,ini berarti posisi keuangan dan kemampuannya dalam kelanjutan pemerintahan untuk memberi pelayanan dan mempertemukannya dengan kewajibannya sebagai hak masyarakat.

3. Variabel Kriteria Persepsi Stakeholders

Persepsi adalah proses yang dialami oleh individu dalam menyeleksi, mengorganisasi dan menginterpresentasikan suatu rangsangan ke dalam suatu gambaran yang berarti dan koheran dengan dunia luar. Sedangkan pengertian *Stakeholders* merupakan kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi

Sebelum dikirimkan kepada responden, kuesioner tersebut terlebih dahulu harus diuji tingkat validitas dan reabilitasnya. Validitas menunjukan sejauh mana instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan Reliabilitasnya menunjukan sejauhmana instrumen pengukuran tersebut dapat dipercaya atau diandalkan. Oleh karena itu setelah istrumen valid dan reliabel maka digunakan untuk mengumpulkan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Jumlah responden pada penelitian ini adalah 100 responden terdiri dari Anggota forum stakeholders, Anggota DPRD dan PNS.

Analisis

Validitas

1. Variabel Akuntabilitas

Berikut adalah hasil pengolahan data statistik untuk pengujian alat validitas dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1

Hasil Pengujian Validitas Akuntabilitas Keuangan

Penyataan	corrected item-totalcorrelation	Titik Kritis	Kesim pulan
Adanya pelaporan pertanggungjawaban	0,338	0,232	Valid
Adanya jenis dan bentuk standar pelaporan	0,394	0,232	Valid
Penyajian informasi tepat waktu	0,380	0,232	Valid
Pemeriksaan (audit) atas pelaporan	0,506	0,232	Valid
Kecepatan respon untuk memperbaiki	0,776	0,232	Valid

Sumber: diolah dari data penelitian

Berdasarkan tabel 1 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kelima pernyataan pada variabel akuntabilitas keuangan adalah valid karena nilai yang didapat berada diatas titik kritis.

2. Variabel Transparansi

Untuk pengolahan data statistik pada variabel transparansi laporan keuangan dapat dilihat pada tabel 2

Table 2

Hasil Pengujian Validitas Transparasi Laporan Keuangan

Penyataan	corrected item-total correlation	Titik Kritis	Kesim pulan
Adanya system informasi keuangan	0,634	0,232	Valid
Keterbukaan informasi dalam pertanggungjawaban keuangan	0,544	0,232	Valid
Aksesibilitas terhadap laporan keuangan	0,532	0,232	Valid
Publikasi laporan keuangan	0,476	0,232	Valid

Sumber: diolah dari kuesioner penelitian

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semuanya pernyataan pada variabel transparansi laporan keuangan dapat dikatakan valid karena nilai corrected item-total correlasi semuanya berada diatas nilai titik kriris.

3. Variabel Persepsi Stakeholders

Hasil pengujian variabel validitas persepsi stakeholder terdapat pada tabel 3

Tabel 3

Hasil Pengujian Validitas Persepsi Stakeholders

Penyataan	Corrected item-total correlation	Titik Kritis	Kesim pulan
Produktifitas akuntabilitas keuangan	0,344	0,232	Valid
Produktivitas transparasi laporan keuangan	0,422	0,232	Valid
Efisiensi proses internal	0,373	0,232	Valid
Efektifitas pendanaan	0,354	0,232	Valid
Ketersediaan laporan keuangan	0,530	0,232	Valid
Kemudahan telusur laporan keuangan	0,478	0,232	Valid
Mutu laporan keuangan	0,405	0,232	Valid
Kepuasan masyarakat dan *stakeholders* lainnya	0,401	0,232	Valid

Sumber: diolah dari kuesioner penelitian

Berdasarkan tabel 2 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan pada variabel persepsi staholders adalah valid karena semuanya berada diatas nilai titik kritis

Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas dengan koefisien Alpha dapat dilihat pada tabel 4

Tabel 4

Hasil Pengujian Reliabilitas dengan Koefisien Alpha

No	Variabel	N of Item	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
1.	Akuntabilitas Keuangan	75	0,676	Reliabel
2.	Transparasi Laporan Keuangan	75	0,733	Reliabel
3.	Persepsi Stakeholders	75	0,719	Reliabel

Sumber: diolah dari data penelitian

Hasil uji reliabilitas pada table 4.4 menunjukkan nilai cronbach's alpha untuk variabel akuntabilitas keuangan adalah sebesar 0,676 untuk variabel transparansi laporan keuangan sebesar 0,733 dan untuk variabel persepsi staholders adalah sebesar 0,719. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel (andal) bila memiliki nilai koefisien keandalan reliabilitas sebesar 0,60 atau lebih.

Statistik Deskriptif

Pertanyaan dalam kuisioner berupa pernyataan positif dan *closeended questions* agar memudahkan dalam pengukuran respon. Skala pengukuran respon yang digunakan adalah 5 (lima) poin *skala likert*, yaitu mulai dari sangat setuju (nilai 5) sampai dengan sangat tidak setuju (nilai 1). Variabel akuntabilitas keuangan dengan 5 (lima) kriteria sebagaimana disajikan dalam table 5 dibawah ini.

Tabel 5

Persepsi terhadap Kriteria Akuntabilitas

Skor	Interval	Persen (%)	Persepsi
Sangat tidak setuju	< 0.200	0.00	Sangat rendah
Tidak setuju	0.200 – 0.399	0.00	Rendah
Netral	0.400 - 0.599	20.68	cukup
Setuju	0.600 - 0.799	74.41	Tinggi
Sangat setuju	0.800 - 1.00	4.91	Sangat tinggi
Jumlah		**100**	

Sumber: diolah dari data penelitian

Dengan demikian, persepsi *stakeholder* terhadap kriteria akuntabilitas tidak ada responden yang menyatakan rendah, sebanyak 20.68 % responden menyatakan cukup. Sedangkan mayoritas responden sebanyak 74.41% menyatakan tinggi.

Statistik Inferensi

Uji T (One Way Anova)

Pengujian hipotesis penelitian yang menyatakan terdapat perbedaan rata-rata persepsi stakeholders terhadap kriteria akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah (Ha^1) diujikan terhadap (Ho^1) yang menyatakan tidak terdapat perbedaan rata-rata persepsi stakeholders terhadap akuntabilitas keuangan pada laporan keuangan pemerintah daerah. Sebelum dilakukan uji anova dilakukan test of homogeneity of variance guna mengetahui variance tiap grup. Hipotesis atas keseragaman varian tersebut adalah:

Ho : varian ketiga kelompok adalah sama

Ha : varian ketiga kelompok berbeda

Hasil test homogeneity of variance untuk ketiga grup yaitu DPRD, PNS dan Forum Anggota Stakeholders tampak dalam tabel 6

Tabel 6

Test of Homogeneity of Variances

akuntabilitas

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
2.553	6	68	.127

Dari tabel tersebut diketahui bahwa: angka Levene's Test : 2,553 dengan probabilitas (sig)sebesar 0,127. dengan berdasar patokan:

- Jika probabilitas atau signifikansi > 0,05 maka Ho diterima
- Jika probabilitas atau signifikansi < 0,05 maka Ho ditolak

Keputusan: karena angka probabilitas atau signifikansi hitung sebesar 0,127 > 0,05 maka Ho diterima, artinya bahwa varian ketiga kelompok tesebut sama. Sehingga atas prasyarat untuk analisis lebih lanjut dapat dilakukan uji anova

Uji Anova dipakai untuk membuktikan bahwa perbedaan rata-rata anggota sampel DPRD, PNS dan Forum Anggota Stakeholders disebabkan oleh faktor kebetulan saja ataukan oleh faktor lain yang berarti (signifikan), (Djarwanto, 1993). Hipotesis nol adalah rata-rata dari ketiga sampel adalah sama. Hipotesis alternatifnya adalah rata-rata yang berbeda diantara sampel tersebut.

Uji Korelasi

Korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan menurut persepsi stakeholders. Berdasarkan hasil analisa pada tabel 7

Tabel 7

Korelasi antara Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan

Correlations

			akunta	transpar
Spearman's rho	akunta	Correlation Coefficient	1.000	.671(**)
		Sig. (2-tailed)	.	.000
		N	75	75
	transpar	Correlation Coefficient	.671(**)	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000	.
		N	75	75

Sumber: diolah dari data penelitian dengan SPSS 14

Koefisien korelasi antara akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan sebesar 0,671 angka tersebut menunjukan kuatnya hubungan antara akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan (diatas 0.05) sedangkan tanda positif menunjukkan hubungan yang searah yang berarti semakin tinggi tingkat akuntabilitas laporan keuangan maka akan diikuti dengan peningkatan transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan begitu juga sebaliknya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang terkumpul, kesimpulan dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skor persepsi anggota forum stakeholders terhadap kriteria akuntabilitas, kriteria transparansi laporan keuangan rata-rata tinggi. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat pada kuesioner.yang digunakan dalam pengujian hipotesis dengan menggunakan prosedur test of homogeneity of variances yang hasil ujinya menunjukan nilai t adalah akuntabilitas 5.033 dengan nilai signifikasi 0.447 dan transparansi 8.330 dengan nilai signifikan 0.909.
2. Uji hipotesis dengan menggunakan uji t memperoleh hasil yang mendukung untuk diterimanya hipotesis penelitian. Berdasarkan uji statistik yang dilakukan, diperoleh nilai signifikan 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian diambil keputusan Ho ditolak Ha diterima. Dapat disimpulkan untuk mencapai pemerintahan adalah tinggi.
3. Tidak terdapat perbedaan persepsi forum stakeholders terhadap kriteria akuntabilitas keuangan dan transparansi laporan keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi untuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 0,467 dan untuk variabel transparansi laporan keuangan adalah sebesar 0,080. Dimana kedua nilai tersebut berada jauh diatas signifikansi alfa yaitu sebesar 0,05.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1) Guna menjembatani perbedaan persepsi akuntabilitas keuangan stakeholders pada laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Selatan

terutama pada Anggota DPRD dan PNS maka perlu diberikan pengarahan tentang arti pentingnya laporan keuangan bagi masyarakat. Sehingga laporan keuangan dibuat tidak hanya sebagai rutinitas belaka sebaga kepatuhan terhadap undang-undang namun juga pendalaman bahwa laporan tersebut dapat juga sebaga pembuatan keputusan sosial ekonomi dan politis

2) Memberikan pemahaman persepsi yang sama terhadap transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan, maka perlu diberikan bimbingan teknis maupun semacamnya sehingga penyaj laporan keuangan dapat ikut berpartisipasi dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah provinsi.

3) Untuk mendukung akuntabilitas dan transparansi yang efektif tersebut sebagaimana dinyatakan dalam pasal 102 dan 103 UU No 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan* antara Pemerintahan Kantor Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka daerah harus menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang dapat menghasilkan informasi berupa:

a. APBD dan Laporan Realisasi APBD (provinsi, kabupaten dan kota)
b. Neraca Daerah
c. Lapoan Arus Kas
d. Catatan atas Laporan Keuangan Daerah
e. Dana Dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
f. Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Negara
g. Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah

Informasi yang dimuat dalam SIKD tersebut merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh masyarakat.

Daftar Rujukan

Accountant Hand's Book Volume 2, Edisi 8, Ch 8

Bastian, Indra, 2001, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*, PPA FE UGM, Yogyakarta.

Bastian, Indra, 2006, *Pengantar Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Bastian, Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Erlangga, Jakarta

BPKP, 2001, *Modul Bimbingan Teknis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, BPKP, Jakarta.

BAPPENAS, 2002, *Empat Belas (14) Prinsip Good Governance.* http:www.good_governance.Bappenas.go.id

BAPPENAS, 2002, *Penerapan Good Governance di Indonesia.* http:www.good_governance.Bappenas.go.id

BAPPENAS, 2002, *Tingkat Pemahaman Aparatur Pemerintah terhadap Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Sekretariat Pengembangan Publik Good Governance*

Biro Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan, 2008, *Perencanaan Strategik*, Biro Keuangan

Budget Accountability, Report and Auditing, Juli 2005

Cooper, R Donald, Pamela S Schindler, 2006, *Bussines Research Methods*, McGraw-Hill Int Edition, USA

Gendron Yves, 2001, "*In the name of Accountability*", Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 14, No. 3, Mcb University Press

Ghozali Imam, 2002, *Aplikasi Analisis Mulitivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang

Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta

IMF, 2001, *Code of Good Practice on Fiscal Transparance*, Edisi Revisi 23 Maret 2001, http:www.IMF.Go.Org

Jonesh, D B, 1985, *The Needs of Users of Governmantal Financial Report*, GASB

Kirk Patrick, Colin, 2002, *Handbook on Development Policy and Management*, Edward Elgar Publish, p. 249-259, p. 400-407

Klumpes, Paul, 2001, "*Generational Accountability of Public Sector Management*", Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 14, No. 2, MCB University Press

LAN dan BPKP, 2001, *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah*, LAN dan BPKP, Jakarta

Lolina, 2003, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi, Sekretariat Good Public Governance*, BAPPENAS, Jakarta

Mahfud, Sidik, 2002, "*Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal*", *Seminar "Setahun Implikasi Kebijaksanaan otonomi Daerah di Indonesia*, Jogjakarta, 13 Maret 2003

Mahmudi, 2006, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, BPFE, Jogjakarta

Mardiasmo, 2000, "*Implikasi APBN dan APBD Dalam Konteks Otonomi Daerah*", Kompak, Nomor 23, April 2000, Hal. 573-587

Mardiasmo, 2000, " *Pengawasan Pengendalian dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah* ,: Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3 Nomor 2, Hal. 441-456

Mardiasmo, 2004, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Andi, Jogjakarta

Mardiasmo, "*Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Mei 2006

Mohamad, 2004, *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*, Jakarta, BP Universitas Trisakti

Mulyana, "*Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksebilitas Keuangan terhadap Akuntabilitas Keuangan dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah*", Tesis S2 Magister Akuntansi UGM (Tidak dipublikasikan), Jogjakarta

Nurkholish, 2002, "*Akuntabilitas publik dan Peran Akuntansi pemerintahan menyongsong Otonomi Daerah*", Lintasan Ekonomi, Vol. XIX, Nomor 1, Januari 2002

Nursadi, Harsanto, 2005, "*Keuangan Daerah : Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke 35, No. 4 Oktober-Desember 2005

Oktavianis Pasoloran , " Teori Stewardship ; Tinjauan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas organisasi Sektor Publik ," Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol. 3 Nomor 2, Hal. 419-432

Potter, Brad, 2002, "*Financial Accounting Reform in the Australian Public Sector*", Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 15 No.1, MCB University Press

Rahaman, Shiraz Abu, 2001, "*A Negoltiated Order Perspective On Public Sector Accounting and Financial Control*, Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol. 14, No. 2, MCB University Press

Ryan, 2002, *Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils:1997-1999*, Financial Accountability and Management, Vol. 18

Sarwono, Jonathan, 2006, *Analisis data Penelitian menggunakan* SPSS 13, Penerbit Andi, Jogjakarta

Sarwono, Jonathan, 2006, *Panduan cepat dan mudah* SPSS 14, Penerbit Andi, Jogjakarta

Shende, Suresh dan Tony Bennet, 2004, Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration. http:www.unpan.org

Siegel, Marconi, 1989, "*Persepsi dan Stakeholders*," Jurnal Akuntansi dan Kinerja Vol. 2 Nomor 2 Hal. 138 - 150

Siregar Iskandar, 2008, *Pengelolaan Pemerintahan yang Bersandar pada Stakeholders* http:www.kabarindonesia.com .

Steccolini, Ileana, 2002, *Local Government Annual Report: an Accountability Medium?* EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reform, Dublin, September 2002. http:www.cergas.info

Sudjana, Edy, 2002, *Users of Public Sector Financial Report Perception on Financial Accountability Reporting of Local Government*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol. 03, No. 01, Agustus 2002

Sugijanto, 2002, "*Peranan Sistem Akuntansi Pusat Dalam Rangka Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999*", Lintasan Ekonomi, Volume XIX, Nomor 1, Januari 2002

Susetya, 2006, "*Persepsi Stakeholders terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah" (studi kasus di Kab.Banyumas*), Tesis S2 Magister Akuntansi UGM (Tidak dipublikasikan), Jogjakarta

Transparency International Secretariat, 2005-2006, *Transparency International Perceptions Index* 2005-2006. http:www.transparency.org

Triadji, Bambang, 2002, *Pengembangan Akuntabilitas Keuangan Daerah, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 03, No. 01, Agustus 2002

---------- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih KKN, SETNEG, Jakarta.

---------- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggunjawaban dan Pengawasan keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tatausaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---------- *Modul Penyusunan Perencanaan Strategik dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*, BPKP, Jakarta .Tahun 2001

---------- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

---------- *Peraturan Menteri Dalam* Negeri No. 4 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

---------- *Peraturan Menteri Dalam* Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan *Permendagri Nomor 13* Tahun 2006

---------- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

---------- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

---------- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

---------- Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

---------- Sumsel dalam angka, 2008,

BPS Provinsi Sumatra Selatan

---------- Undang-undang No. 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara

---------- Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara

---------- Undang-undang No. 17 Tahun

2003 tentang Keuangan negara

---------- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Depdagri, Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

---------- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah, Depdagri, Jakarta. sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004